



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PASAMAN**

**TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman selama Tahun 2017, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Disamping itu, Laporan ini juga akan dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017 dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

**Lubuk Sikaping, Januari 2018**  
**Kepala**

**Drs. ADASMI, MM**  
**Nip19651010 199203 1 008**

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum SKPD
  - 1. Struktur Organisasi
  - 2. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 3. Kepegawaian

#### **BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

#### **BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 1. Target dan Realisasi
  - 2. Permasalahan dan Solusi
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
  - 1. Target dan Realisasi
  - 2. Permasalahan dan Solusi

#### **BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
  - 1. Program dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
  - 1. Program dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan Solusi

#### **BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Program Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya
  - 4. Sumber Dana Dan Jumlah Anggaran
  - 5. Permasalahan dan Solusi
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Nagari
  - 3. Sumber Dana Dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana dan Prasarana

## **BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

- A. Kerjasama Antar Daerah
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kerjasama SKPD dengan Pihak Ketiga
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan Solusi
- D. Pembinaan Batas Wilayah
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan Solusi
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
  - 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
  - 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota)
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
  - 5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - 1. Gangguan Yang Tejadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
  - 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
  - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
  - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

## **BAB VII PENUTUP**

## DAFTAR TABEL

No. Tebel	Nama Tebel	Halaman
<b>1.1</b>	Daftar Nominatif PNS 2017	.....
<b>2.1</b>	Tujuan dan Sasaran Badan/Dinas Kantor ..... Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 ( <i>sesuai tabel 4.1 Renstra SKPD</i> )	.....
<b>4.1</b>	Urusan/Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi <i>wajib pelayanan dasar/non pelayanan dasar/pilihan/fungsi penunjang</i> ..... Tahun 2017	.....
<b>4.2</b>	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan <i>wajib pelayanan dasar/non pelayanan dasar/pilihan/fungsi penunjang</i> ..... Tahun 2017 ( <i>Indikator Sasaran Renstra SKPD Tahun 2017</i> )	.....
<b>4.3</b>	Capaian Indikator Kinerja Urusan <i>wajib pelayanan dasar/non pelayanan dasar/pilihan/fungsi penunjang</i> ..... Tahun 2017	.....
<b>4.4</b>	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Urusan <i>wajib pelayanan dasar/non pelayanan dasar/pilihan/fungsi penunjang</i> ..... Tahun 2016 dan 2017	.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Akhir Tahun Anggaran 2017 disusun dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Akhir Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman;
4. Surat Bupati Pasaman Nomor : 050/...../Litbang/Bappeda-2017 tanggal ..... Desember 2017 perihal Permintaan LKPJ SKPD Akhir Tahun Anggaran 2017.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 sebagai Satuan Kerja yang dinilai cukup strategis dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam bidang perencanaan pembangunan. Keberadaannya sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan yang baik untuk pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien guna mewujudkan masyarakat Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya.

## **B. Gambaran Umum**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- d. Bidang Data dan Perlindungan Perempuan
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### 3. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pegawai sebanyak 18 (delapan belas) orang seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nominatif Pegawai Negeri**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No.	NAMA	NIP	TTL	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PNDDKN	DIKLAT KEPEMIMPIN AN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3		4	5	6	7
<b>A. STRUKTURAL</b>							
<b>I. Kepala</b>							
1	Drs. Adasmi, MM	19651010 199203 1008	SIMPANG III. Air Hangat.	Kepala DPP-PA	IV/c Pembina Utama Muda	S2	PIM III
<b>II. Sekretariat</b>							
2.	Dra. ASRI SUHERTI	19611231 1991032015	ALAHAN PANJANG	Sekretaris	IV/b Pembina Tk. I	S1	PIM III
3.	PIT WARTINI	19601220 198503 2003	Bukittinggi	Kasubag Keuangan dan Evaluasi Pelaporan	III/d Penata Tk. I	S1 Hukum	
4.	ASTITA WIZA	19700404 199001 2001	Kinali	Kasubag Umum	III/c Penata	SMA	
5.	WARHAMNA RIDHA	19860128 201101 2009	Panyabungan	Staf	II/d Penata Tk. I	D3 Akuntansi	
6.	RAITISKA	19860421 201001207	Lubuk Sikaping	Staf	II/b Pengatur Muda tk. I	SMA	
7.	AHMAD TANZIL	19701026 200701 1004	Sungai Pandahan	Staf	II/c Pengatur	SMA	
<b>III. Sub Bagian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak</b>							
8.	YULINDA YUDI, SKM	19700830 199303 2004	/LUBUK SIKAPING	Kabid	IV/a Pembina	S1	
9.	RAMANIZAR, S.Sos	19621014 198602 2002	Air Kijang	Kasi	III/d Penata Tk. I	S1	ADUM
10.	YUSTIMAR	19640616 198703 2004	Cubadak	Kasi	III/d Penata Tk. I	SMA	
<b>IV. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Gender</b>							
11.	RATNAWATI, S.Pdi. Mpd	19650205 198603 2004	Mapun	Kabid	IV/a Pembina	S2	
12.	EVA YULIANIS, SE, Msi	19820720 200901 2006	simpang alahan mati	Kasi	III/b Penata Muda Tk. I	S2	PIM IV
13.	SEPTRINA, SH	19640913 198703 2002	Lubuk Sikaping	Kasi	IV/a Pembina	S1	
14.	DARMADI, SH	19700518 200701 1005	Sundatar	Kasi	III/a Penata Muda	S1	
<b>V. Bidang Data dan Perlindungan Perempuan</b>							
15.	YANUAR, SH	19650117 198802 1001	Koto Randah	Kabid	III/d Penata tk. I	S1	
16.	NETTY, AMD Kep	19610909 198703 2002	Lubuk Sikaping	Kasi	III/d Penata Tk.I	D3	
17.	NASRIL, SH	19650930 198803 1005	Kampung Tengah	Kasi	III/d Penata Tk.I	S1	
18.	MINARTI, SE	19810713 201001 2021	RAO	Staf	III/a Penata Muda	S1	



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

##### **1. Visi**

Perumusan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman mengacu pada tugas pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal tersebut di atas maka visi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman adalah :

**“Mewujudkan perempuan yang berkualitas dan perlindungan anak”**

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman diatas mengandung makna pokok yang terdiri dari 2 komponen yakni mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, dan mewujudkan hidup yang berkualitas . Adapun pengertian 2 komponen pernyataan Visi tersebut adalah:

<b>mewujudkan</b>	:	Mewujudkan Kabupaten Pasaman khususnya yang
<b>perlindungan anak</b>		bebas dari tindak kekerasan terhadap anak
<b>Mewujudkan</b>	:	peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing
<b>perempuan</b>	<b>yang</b>	serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan
<b>berkualitas</b>		masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa.

##### **2. Misi**

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 dirumuskan dalam bentuk Misi. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan sesuai dengan lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Misi ini mengandung makna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik serta penanggulangan kekerasan pada perempuan.

2. Meningkatkan kualitas keluarga

Misi ini mengandung makna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan, penanggulangan kekerasan serta penelantaran anak.

3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Misi ini mengandung makna anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

4. Meningkatkan sistem data gender dan anak

Pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

### **3. Tujuan**

Hasil yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang dilatarbelakangi dalam upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

1. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Tersedianya sistem data gender dan anak
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan program responsif gender
4. Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
5. Meningkatkan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Pasaman

### **3. SASARAN**

Dalam mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi secara sistematis dijabarkan nilai manfaat atas tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021. Adapun sasaran tersebut antara lain:

- a. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik
- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
- c. Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten / kota
- d. Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO
- e. Dimilikinya sistem data gender dan anak
- f. Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal
- g. Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 (sesuai tabel 4.1 Renstra SKPD)  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA TAHUN 2016	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan kesetaraan gender dan program responsif gender	a. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	- Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	Orang	50	50	70	90	120	144	144
		- Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	Orang	120	120	100	125	125	130	130
2. Meningkatkan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Pasaman	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	- Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	Nagari	10	4	5	14	14	15	15
		- Pembentukan FA Kecamatan/nagari	Kec	5	5	2	10	10	10	10
		- Pertemuan FA Kabupaten.	Kali	1	1	1	1	1	1	1
		- Terlaksananya sosialisasi PATBM di Kabupaten / kec/ nagari	Kali	-	-	1	12	10	10	10
		- Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	Kali	1	1	1	1	1	1	1
		- sosialisasi PA di sekolah	Kali	-	-	10	10	10	10	10
3. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	c. Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten / kota	- terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	Kab/ Kec/ nagari	-	1	12	10	10	10	10
		- Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	Kali	-	1	1	1	1	1	1
	d. Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO	- Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	50	55	60	65	70	70	70
		- Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Orang	-	40	-	-	-	-	-
4. Tersedianya sistem data gender dan anak	e. Dimilikinya sistem data gender dan	- tersedianya sistem data gender dan anak	System	-	-	1	1	1	1	1

5. Meningkatkan kesetaraan gender dan program responsif gender	anak	Terlaksananya sosialisasi data terpilah	Orang	-	70	-	-	-	-	-
	f. Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	Orang	-	280	320	460	560	336	336
	g. Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Orang	-	120	90	125	130	135	135

#### 4. KEBIJAKAN

Untuk mendukung impementasi strategi secara optimal maka dirumuskan kebijakan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Adapun strategi tersebut dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

- a. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak
- b. Peningkatan dan penguatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi PATBM
- c. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyediaan pemutakhiran data pilah pada SIGA
- d. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG
- e. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan
- f. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan disemua bidang
- g. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kabupaten / kota layak anak

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH**

### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

#### **1. Target dan Realisasi**

Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tahun 2017 pada APBD awal direncanakan sebesar Rp.4.449.813.737,- dan terjadi perubahan pada APBD Perubahan Rp.3.539.350.467,- dengan realisasi diakhir tahun anggaran sebesar Rp. ,00 atau 94,42%

#### **2. Permasalahan dan solusi.**

Secara umum tidak terjadi permasalahan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman selama Tahun Anggaran 2017

### **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

#### **1. Target dan Realisasi**

##### a) Belanja Tidak Langsung

- Alokasi anggaran Rp 1.454.082.717,-
- Realisasi anggaran Rp 1.279.408.589 atau (87.99 % ),-
- Sisa lebih anggaran Rp 174.874.128 ,-

##### b) Belanja Langsung

- Alokasi anggaran Rp. 2.086.827.750 ,-
- Realisasi anggaran Rp 1.916.587.305 atau ( 91.84 % ),-
- Sisa lebih anggaran Rp 170.240.345 ,-

#### **2. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja APBD Tahun Anggaran 2017, dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dan tidak ditemui kendala pelaksanaan. Sisa lebih pengelolaan belanja dalam rangka penerapan prinsip efisiensi, efektifitas dan skala prioritas penyerapan anggaran.

Permasalahan	Solusi	Ket
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>2. Sarana dan prasarana kerja kurang maksimal</li> <li>3. Belum tersedianya kendaraan operasional yang representatif untuk melaksanakan dan pembinaan penyelesaian kasus di lapangan</li> <li>4. Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak masih ada kendala pengumpulan data indikator penilaian KLA di masing-masing OPD yang terkait (Bukti Fisik)</li> <li>5. Forum anak masih rendahnya partisipasi anak dalam pelaksanaan kegiatan disebabkan karena tidak tersedianya dana operasional</li> <li>6. Penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang tersedia</li> <li>7. Belum tercapainya persentase capaian sasaran yang pada awalnya sebanyak 2 angkatan karena terjadi deviasi anggaran sehingga dilaksanakan 1 angkatan</li> <li>8. Belum tersedianya data terpilah di sebahagian OPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah diusulkan penambahan pegawai ke BKD</li> <li>2. Penganggaran penambahan sarana dan prasarana pada tahun 2018</li> <li>3. Telah dinaikkan telaahan staf ke Bupati untuk permintaan penambahan kendaraan operasional tetapi belum ditindak lanjuti</li> <li>4. Perlu pertemuan secara berkala tim teknis KLA sehingga semua indikator dapat tercapai</li> <li>5. Perlu anggaran tersendiri untuk forum anak di Kabupaten Pasaman</li> <li>6. Penambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk biaya konseling ke psikolog</li> <li>7. Diharapkan agar tahun 2018 terlaksana II angkatan untuk meningkatkan persentase target sasaran</li> <li>8. Agar OPD dapat menyediakan data sesuai dengan kebutuhan dan data dikumpul dan direkap oleh DPP-PA Kab. Pasaman</li> </ol>	

<p>9. Kurangnya komitmen OPD dalam pengisian data terpilah di masing-masing OPD</p> <p>10. Untuk sosialisasi P2TP2A masih rendah capaiannya karena masih 6 (enam) nagari sehingga rendah tingkat persentase capaian target sasarannya</p>	<p>9. Agar masing-masing OPD komitmen dengan pengisian data terpilah</p> <p>10. Untuk meningkatkan persentase sosialisasi P2TP2A ini agar tahun 2018 diusulkan penambahan jumlah nagarinya sebanyak 6 (enam) nagari</p>
---	---



## gBAB IV

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman melaksanakan *wajib pelayanan non dasar* dengan 8 Program dan 16 Kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Urusan/Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi**  
**Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
1	Program Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran ( Sekretariat )	Rp. 169.778.200	Rp. 156.290.316	92.06	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran dengan capaian
	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (Sekretariat )	Rp. 85.667.500	Rp. 83.876.400	97.91	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur PNS
	Rapat-rapat koordinasi ( Sekretariat )	Rp. 95.800.000	Rp. 95.705.500	99.90	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Mesin ( Sekretariat )	Rp. 41.000.000	Rp. 41.000.000	100	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengadaan peralatan dan mesin berupa computer sebanyak 2 unit, meja sebanyak
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian aparatur ( Sekretariat )	Rp. 7.900.000	Rp. 7.650.000	96.84	Meningkatnya kualitas kinerja PNS dengan pengadaan pakaian dinas untuk 22 pegawai
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SOPD ( Sekretariat )	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100	Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi keuangan di bidang berupa 1. RKT 2. PK 3. IKU 4. LAKIP

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
					5. LKPJ 6. LPPD 7. RENSTRA
5	Progma Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra SOPD	Rp. 5.000.000	Rp. 3.925.000	78.50	Tersusunnya laporan RENSTRA untuk jangka waktu 2017 s/d 2021
6	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Fasilitasi pengembangan P2TP2A	Rp. 152.382.500	Rp. 134.025.550	87.95	Sosialisasi P2TP2A dilaksanakan 6 kecamatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koto kaciak / bonjol tanggal 2 mei 2017 sebanyak 40 orang</li> <li>2. Sontang / padang gelugur tanggal 4 mei 2017 sebanyak 40 orang</li> <li>3. Tarung-tarung / rao tanggal 5 mei 2017 sebanyak 40 orang</li> <li>4. Simpati / Alahan Mati tanggal 25 juli 2017 sebanyak 40 orang</li> <li>5. Binjai / Tigo Nagari tanggal 26 juli 2017 sebanyak 40 orang</li> <li>6. Simpang Tonang / duo koto tanggal 27 juli 2017 sebanyak 40 orang</li> </ol> Sosialisasi P2TP2A di Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11 april 2017 di syamsiar tahib sebanyak 100 orang
	Pemetaan potensi organisais dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan permepuan dan anak	Rp. 81.987.000	Rp. 79.406.050	96.85	Pelatihan pemetaan dilaksanakan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten di Syamsiar Thaib tanggal 12 desember 2017 yang dihadiri 35 peserta</li> <li>2. Kabupaten di Hotel Hamco tanggal 13 desember 2017 sebanyak 35 orang</li> </ol>
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Rp. 161.393.600	Rp. 143.188.650	88.72	Pelatihan keterampilan rumah tangga untuk 4 nagari dengan peserta masing-masing 10 orang dengan nagari sebagai berikut : a. Nagari Malampah kecamatan tigo nagari pada tanggal 9 – 10 oktober

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
					<p>2017</p> <p>b. Nagari Simpang Tonang kec. Duo Koto tanggal 17-18 oktober 2017</p> <p>c. Nagari Koto Nopan kec. Rao Utara tanggal 13 – 14 oktober 2017</p> <p>d. Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan tanggal 27 – 28 november 2017</p>
	Pelaksanaan gugus tugas Kabupaten layak anak	Rp. 91.533.000	Rp. 90.353.850	98.71	Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28 agustus 2017 dengan pesertta sebanyak 150 orang yang tgerdiri dari Kepala OPD, tim gugus tugas, camat, kepala UPT dunas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Puskesmas dan wali nagari se Kab-Pasaman dan perwakilan forum anak Kabupaten
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender	Rp. 170.443.850	Rp. 135.393.200	1. 79.44	<p>Pelaksanaan pembentukan forum anak ini dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu :</p> <p>a. Kec Rao Utara tanggal 9 mei 2017 peserta 30 orang</p> <p>b. Kec Padang Gelugur tanggal 10 mei 2017 peserta 30 orang</p> <p>c. Kec. Duo Koto tanggal 12 mei 2017 peserta 30 orang</p> <p>d. Kec. Rao Selatan tanggal 15 mei 2017 peserta 30 orang</p> <p>e. Kec. Simpang Alahan Mati tanggal 16 mei 2017 peserta 30 orang</p> <p>Pelaksanaan kegiatan forum anak Kab. Pasaman dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 19 agustus 2017 di Wisma Murni</p> <p>Pertemuan forum anak tingkat propinsi dihadiri oleh pengurus forum anak Kab. Pasaman sebanyak 3 orang Pa-Pi dari SMA/SMK Lubuuk Sikaping yang dilaksanakan di Padang</p> <p>Dari 3 orang pengurus Forum Anak Kab. Pasaman dikirim ke Propinsi di atas, terseleksi 1 orang wakil Forum Anak Kab. Pasaman untuk menghadiri</p>

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
					hari anak nasional di Pekanbaru pada tanggal 23 juli 2017
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang Iptek	Rp. 220.698.500	Rp. 184.795.200	83.73	Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 nov 2017 bertemapt di Wisma Murni dengan peserta sebanyak 27 orang
7	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Workshop peningkatan peranperempuan dalam pengambilan keputusan	Rp. 62.418.100	Rp. 54.136.850	86.73	Dilaksanakan di Hotel Hamco tanggal 5 s/d 7 september 2017 yang dihadiri 40 orang
	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Rp. 145.376.500	Rp. 141.457.900	97.30	Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap.  Tahap I untuk 4 kecamatan bagi organisasi BKMT yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kec. Rao tanggal 16 maret 2017</li> <li>2. Kec. Rao tanggal 17 maret 2017</li> <li>3. Kec. Duo Koto tanggal 22 maret 2017</li> <li>4. Kec. Padang Gelugur 21 maret 2017</li> </ol> Tahap II pada Organisasi PKK <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nagari Sundata tanggal 16 mei 2017</li> <li>2. Nagari Tanjuung Betung Kec. Rao selatan tanggal 17 mei 2017</li> <li>3. Nagari limo Koto Kec. Bonjol tanggal 18 mei 2017</li> <li>4. Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao tanggal 22 mei 2017</li> </ol>
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan	Rp. 589.448.900	Rp. 559.382.839	94.90	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan organisasi perempuan dilaksanakan di 2 keamatan yaitu Kecamatan mapat Tunggul dan Kec. Simpati dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 agustus 2017</li> <li>2. Peningkatan kapasitas perempuan di partai politik dilaksanakan pad tanggal 23 mei 2017 di lantai 3 Kantor Bupati</li> <li>3. Penyuluhan kualitas perempuan</li> </ol>

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
					dan konsep diri dilaksanakan di Gedung Syamsiar Thaib pada tanggal 20 maret 2017

## B. Realisasi Program dan Kegiatan

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

### 1. Program Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 3 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Administrasi perkantoran dianggarkan dana sebesar Rp. 169.778.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 156.290.316 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 92.06 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dianggarkan dana sebesar Rp. 85.667.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.876.400 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 97.91%, dan realisasi fisik 100,00%. Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur PNS
- c) Rapat dan koordinasi dianggarkan dana sebesar Rp. 95.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.705.500 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 99.90%, dan realisasi fisik 100,00%. Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran. Adapun output kegiatan ini Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

## **2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur**

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin dianggarkan dana sebesar Rp. 41.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.000.000 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 100,00 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengadaan peralatan dan mesin berupa computer sebanyak 2 unit, meja sebanyak

## **3. Program Disiplin Aparatur**

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur dianggarkan dana sebesar Rp. 7.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.650.000 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 96.84 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya kualitas kinerja PNS dengan pengadaan pakaian dinas untuk 22 pegawai

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyusunan laporan SOPD dianggarkan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 100.00 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi keuangan di bidang berupa

- 1) RKT
- 2) PK
- 3) IKU
- 4) LAKIP
- 5) LKPJ
- 6) LPPD

## **5. Program Perencanaan pembangunan daerah**

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyusunan laporan Renstra SOPD dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.925.000 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 78.50 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Tersusunnya laporan RENSTRA untuk jangka waktu 2017 s/d 2021

## **6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 8 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang IPTEK dianggarkan dana sebesar Rp. 220.698.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 184.795.200 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 83.73 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 nov 2017 bertemapt di Wisma Murni dengan peserta sebanyak 27 orang
- b) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan dana sebesar Rp. 170.443.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 135.393.200 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 79.44 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini
  - 1) Pelaksanaan pembentukan forum anak ini dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu :
    - Kec Rao Utara tanggal 9 mei 2017 peserta 30 orang
    - Kec Padang Gelugur tanggal 10 mei 2017 peserta 30 orang
    - Kec. Duo Koto tanggal 12 mei 2017 peserta 30 orang
    - Kec. Rao Selatan tanggal 15 mei 2017 peserta 30 orang
    - Kec. Simpang Alahan Mati tanggal 16 mei 2017 peserta 30 orang
  - 2) Pelaksanaan kegiatan forum anak Kab. Pasaman dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 19 agustus 2017 di Wisma Murni

- 3) Pertemuan forum anak tingkat propinsi dihadiri oleh pengurus forum anak Kab. Pasaman sebanyak 3 orang Pa-Pi dari SMA/SMK Lubuuk Sikaping yang dilaksanakan di Padang
  - 4) Dari 3 orang pengurus Forum Anak Kab. Pasaman dikirim ke Propinsi di atas, terseleksi 1 orang wakil Forum Anak Kab. Pasaman untuk menghadiri hari anak nasional di Pekanbaru pada tanggal 23 juli 2017
- c) Kegiatan Pelaksanaan gugus tugas kabupaten layak anak dianggarkan dana sebesar Rp. 91.533.000 dengan realisasi sebesar Rp. 90.353.850 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 98.71 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Kegiatan ini Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28 agustus 2017 dengan peserta sebanyak 150 orang yang terdiri dari Kepala OPD, tim gugus tugas, camat, kepala UPT dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Puskesmas dan wali nagari se Kab-Pasaman dan perwakilan forum anak Kabupaten
- d) Kegiatan Fasilitasi pengembangan P2TP2A dianggarkan dana sebesar Rp. 152.382.500 dengan realisasi sebesar Rp. 134.025.550 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 87.95 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Sosialisasi P2TP2A dilaksanakan 6 kecamatan yaitu :
- 1) Koto kaciak / bonjol tanggal 2 mei 2017 sebanyak 40 orang
  - 2) Sontang / padang gelugur tanggal 4 mei 2017 sebanyak 40 orang
  - 3) Tarung-tarung / rao tanggal 5 mei 2017 sebanyak 40 orang
  - 4) Simpati / Alahan Mati tanggal 25 juli 2017 sebanyak 40 orang
  - 5) Binjai / Tigo Nagari tanggal 26 juli 2017 sebanyak 40 orang
  - 6) Simpang Tonang / duo koto tanggal 27 juli 2017 sebanyak 40 orang
  - 7) Sosialisasi P2TP2A di Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11 april 2017 di syamsiar tahib sebanyak 100 orang
- e) Kegiatan Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dianggarkan dana sebesar Rp. 81.987.000 dengan realisasi



sebesar Rp. 79.406.050 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 96.85 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Pelatihan pemetaan dilaksanakan

- 1) Kabupaten di Syamsiar Thaib tanggal 12 desember 2017 yang dihadiri 35 peserta
- 2) Kabupaten di Hotel Hamco tanggal 13 desember 2017 sebanyak 35 orang

f) Kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dianggarkan dana sebesar Rp. 161.393.600 dengan realisasi sebesar Rp. 143.188.650 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 88.72 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Pelatihan keterampilan rumah tangga untuk 4 nagari dengan peserta masing-masing 10 orang dengan nagari sebagai berikut :

- 1) Nagari Malampah kecamatan tigo nagari pada tanggal 9 – 10 oktober 2017
- 2) Nagari Simpang Tonang kec. Duo Koto tanggal 17-18 oktober 2017
- 3) Nagari Koto Nopan kec. Rao Utara tanggal 13 – 14 oktober 2017
- 4) Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan tanggal 27

#### **5) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 2 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dianggarkan dana sebesar Rp62.418.100 dengan realisasi sebesar Rp. 54.136.850 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 86.73 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Dilaksanakan di Hotel Hamco tanggal 5 s/d 7 september 2017 yang dihadiri 40 orang
- b) Kegiatan Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender dianggarkan dana sebesar Rp.145.376.500 dengan realisasi sebesar Rp. 141.457.900

,- presentase realisasi anggaran sebesar 97.30 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap.

Tahap I untuk 4 kecamatan bagi organisasi BKMT yaitu

- 1) Kec. Rao tanggal 16 maret 2017
- 2) Kec. Rao tanggal 17 maret 2017
- 3) Kec. Duo Koto tanggal 22 maret 2017
- 4) Kec. Padang Gelugur 21 maret 2017

Tahap II pada Organisasi PKK

- 1) Nagari Sundata tanggal 16 mei 2017
- 2) Nagari Tanjuung Betung Kec. Rao selatan tanggal 17 mei 2017
- 3) Nagari limo Koto Kec. Bonjol tanggal 18 mei 2017
- 4) Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao tanggal 22 mei 2017

**6) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dianggarkan dana sebesar Rp 589.448.900 dengan realisasi sebesar Rp559.382.839 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 94.90 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan mapat Tunggul dan Kec. Simpati dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 agustus 2017 dan pelaksanaan Peningkatan kapasitas perempuan di partai politik dilaksanakan pada tanggal 23 mei 2017 di lantai 3 Kantor Bupati serta Penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri dilaksanakan di Gedung Syamsiar Thaib pada tanggal 20 maret 2017

Untuk melihat capaian indikator kinerja *urusan wajib pelayanan non dasar*. dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja (*Indikator Sasaran Renstra SKPD Tahun 2017*)**  
**Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	Orang	50	50	100
2	Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	Orang	120	120	100
3	Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	Nagari	4	4	100
4	Pembentukan FA Kecamatan/nagari	Kec	5	5	100
5	Pertemuan FA Kabupaten.	Kali	1	1	100
6	Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	Kali	1	1	100
7	Terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	Kab/ Kec/ nagari	1	1	100
8	Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	Kali	1	1	100
9	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	55	55	100
10	Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Orang	40	40	100
11	Terlaksananya sosialisasi data terpilah	Orang	70	70	100
12	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	Orang	280	280	100
13	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Orang	120	120	100

Berdasarkan uraian dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja *wajib pelayanan dasar non* tersebut dari 16 indikator kinerja yang dilaksanakan *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Tahun 2017**

NO.	Klasifikasi penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	100 % s.d >100 %	Sangat Baik	13	100
2.	90 s/d < 100 %	Baik	-	-
3.	80 s/d < 90 %	Cukup Baik	-	-
4.	60 s/d < 80 %	Sedang	-	-
5.	0 s/d < 60 %	Gagal	-	-
JUMLAH			13	100

Dengan demikian pencapaian *wajib pelayanan non dasar* yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dengan predikat baik adalah sebanyak 16 indikator atau 100%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman secara umum sudah baik.

Untuk mengetahui perkembangan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman, maka diperlukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja selama dua tahun anggaran yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**  
**Tahun 2016 dan 2017**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	Orang	<b>50</b>	50
2	Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	Orang	<b>120</b>	120
3	Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	Nagari	<b>10</b>	4
4	Pembentukan FA Kecamatan/nagari	Kec	<b>5</b>	5
5	Pertemuan FA Kabupaten.	Kali	<b>1</b>	1
6	Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	Kali	<b>1</b>	1
7	Terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	Kab/ Kec/ nagari	-	1
8	Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	Kali	-	1
9	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	<b>50</b>	55
10	Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Orang	-	40
11	Terlaksananya sosialisasi data terpilah	Orang	-	70
12	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	Orang	-	280
13	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Orang	-	120

### C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Ket
1. Kurangnya jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Telah diusulkan penambahan pegawai ke BKD	
2. Sarana dan prasarana kerja kurang maksimal	2. Penganggaran penambahan sarana dan prasarana pada tahun 2018	
3. Belum tersedianya kendaraan operasional yang representatif untuk melaksanakan dan pembinaan penyelesaian kasus di lapangan	3. Telah dinaikkan telaahan staf ke Bupati untuk permintaan penambahan kendaraan operasional tetapi belum ditindak lanjuti	
4. Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak masih ada kendala pengumpulan data indikator penilaian KLA di masing-masing OPD yang terkait (Bukti Fisik)	4. Perlu pertemuan secara berkala tim teknis KLA sehingga semua indikator dapat tercapai	
5. Forum anak masih rendahnya partisipasi anak dalam pelaksanaan kegiatan disebabkan karena tidak tersedianya dana operasional	5. Perlu anggaran tersendiri untuk forum anak di Kabupaten Pasaman	
6. Penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang tersedia	6. Penambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk biaya konseling ke psikolog	
7. Belum tercapainya persentase capaian sasaran yang pada awalnya sebanyak 2 angkatan karena terjadi deviasi anggaran sehingga dilaksanakan 1 angkatan	7. Diharapkan agar tahun 2018 terlaksana II angkatan untuk meningkatkan persentase target sasaran	
8. Belum tersedianya data terpilah di sebahagian OPD	8. Agar OPD dapat menyediakan data sesuai dengan kebutuhan dan data dikumpul dan direkap	

<p>9. Kurangnya komitmen OPD dalam pengisian data terpilah di masing-masing OPD</p> <p>10. Untuk sosialisasi P2TP2A masih rendah capaiannya karena masih 6 (enam) nagari sehingga rendah tingkat persentase capaian target sasarnya</p>	<p>oleh DPP-PA Kab. Pasaman</p> <p>9. Agar masing-masing OPD komitmen dengan pengisian data terpilah</p> <p>10. Untuk meningkatkan persentase sosialisasi P2TP2A ini agar tahun 2018 diusulkan penambahan jumlah nagarinya sebanyak 6 (enam) nagari</p>	
---	---	--

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

**A. Tugas Pembantuan Yang Diterima .....(nihil)**

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya Serta Realisasinya
4. Sumber Dana Dan Jumlah Anggaran
5. Permasalahan dan Solusi

**B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan .....(nihil)**

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Nagari
3. Sumber Dana Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana



**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

- A. Kerjasama Antar Daerah ..... (NIHIL)**
1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kerjasama SKPD dengan Pihak Ketiga ..... (NIHIL)**
1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan Solusi
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**
1. **Kebijakan dan Kegiatan**
  2. **Realisasi pelaksanaan kegiatan**
  3. **Permasalahan dan solusi**
    - a) **Permasalahan**
    - b) **Solusi**
- D. Pembinaan Batas Wilayah ..... NIHIL**
1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan Solusi
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana ..... NIHIL**
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
  2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota)
  3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
  5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ..... NIHIL**
1. Gangguan Yang Tejadi (konflik bebbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
  2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
  4. Sumber dan Jumlah Anggaran
  5. Penaggulangan dan Kendalanya
  6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penaggulangan

## **BAB VII PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya '*good governance*', yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Untuk menanggulangi kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang diantaranya adalah :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan mengenai informasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra periode 2016-2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan capaian sasaran tahun 2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2017.

**Lubuk Sikaping, Januari 2018**  
**Kepala**

**Drs. ADASMI, MM**  
**NIP. 196510101992031008**